

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/PMK.03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN
TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU
DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SURAT KETERANGAN BEBAS, RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN
PEROLEHAN, DAN LAPORAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN
DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT
STRATEGIS

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN BAGI PKP PEMOHON
FASILITAS PEMBEBAHAN BEA MASUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor: KET-.....(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor(3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

nama	:		(4)
NPWP	:		(5)
alamat	:		(6)
jenis usaha	:		(7)
lokasi proyek	:		(8)
no. keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk*)	:		(9)
periode SKB PPN Pemilik Proyek	:		(10)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana



tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan sebagaimana terlampir, untuk periode sejak(11)

Demikian disampaikan.

....., ...(12)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode verifikasi

re

✓

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
BAGI PKP PEMOHON FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
- (5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN.
- (6) Diisi dengan alamat PKP pemohon SKB PPN.
- (7) Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemohon SKB PPN sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (8) Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan pabrik akan ditempatkan.
- (9) Diisi dengan nomor keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan Bea Masuk.
- (10) Diisi dengan masa berlaku keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan Bea Masuk.
- (11) Diisi dengan masa berlaku SKB PPN, yaitu sama dengan nomor (10).
- (12) Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN.



B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN BAGI PKP PENYEDIA PEKERJAAN EPC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
KET-.....(2)

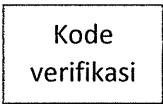
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor(3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

nama	:		(4)
NPWP	:		(5)
alamat	:		(6)
jenis usaha	:		(7)
lokasi proyek	:		(8)
no. keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk*)	:		(9)
no. SKB PPN Pemilik Proyek	:		(10)
periode SKB PPN Pemilik Proyek	:		(11)
no. kontrak	:		(12)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan sebagaimana terlampir, untuk periode sejak(13).

Demikian disampaikan.

....., ...(14)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



*) Diisi jika ada

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
BAGI PKP PENYEDIA PEKERJAAN EPC

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
- (5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN.
- (6) Diisi dengan alamat PKP pemohon SKB PPN.
- (7) Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemohon SKB PPN sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (8) Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan pabrik akan ditempatkan.
- (9) Diisi nomor keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk jika ada.
- (10) Diisi dengan nomor SKB PPN Pemilik Proyek.
- (11) Diisi dengan periode berlaku SKB PPN Pemilik Proyek.
- (12) Diisi dengan nomor kontrak antara Pemilik Proyek dengan Kontraktor EPC.
- (13) Diisi dengan periode yang sama dengan periode berlaku SKB Pemilik Proyek nomor (11).
- (14) Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN.

re

/

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN BAGI PKP BUKAN PEMOHON FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
KET-.....(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor(3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

nama :(4)
NPWP :(5)
alamat :(6)
jenis usaha :(7)
lokasi proyek :(8)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan sebagaimana terlampir, untuk periode*):

- ☐ SKB PPN bagi PKP yang menghasilkan BKP
☐ 1 (satu) tahun sejak 1 Januari s.d. 31 Desember(9)
☐ 1 (satu) tahun sejak(10) s.d 31 Desember(11)
- ☐ SKB PPN bagi PKP Pemilik Proyek
☐ 2 (dua) tahun sejak 1 Januari s.d. 31 Desember(12)
☐ 2 (dua) tahun sejak (13) s.d 31 Desember(14)

Demikian disampaikan.

....., ...(15)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode
verifikasi

h

f

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
BAGI PKP BUKAN PEMOHON FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
- (5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN.
- (6) Diisi dengan alamat PKP pemohon SKB PPN.
- (7) Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemohon SKB PPN sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (8) Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan pabrik akan ditempatkan. Untuk nomor (9) sampai dengan (14) *) pilih salah satu dengan tanda ✓
- (9) Diisi tahun berakhirnya SKB PPN.
- (10) Diisi tanggal mulai berlakunya SKB PPN.
- (11) Diisi tahun berakhirnya SKB PPN.
- (12) Diisi tahun berakhirnya SKB PPN.
- (13) Diisi tanggal mulai berlakunya SKB PPN
- (14) Diisi tahun berakhirnya SKB PPN
- (15) Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN.



NAMA	:	(1)
NPWP	:	(2)
ALAMAT	:	(3)
NOMOR RKIP	:	(4)
TANGGAL	:	(5)
NOMOR SKB	:	(6)
PERIODE	:	(7)
NO. KONTRAK	:	(8)
LOKASI PROYEK	:	(9)

PELABUHAN :(11)
KANTOR PABEAN :(12)

I. Sebagai PKP yang menghasilkan BKP (13)

[illegible]

II. Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC (14)

No	JENIS BARANG	KODE HS	NEGARA ASAL	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/ CIF (US\$)	PERKIRAAN PPN TERUTANG (Rp)*	BEA MASUK
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-

*) dalam Rupiah, sesuai dengan kurs Kementerian Keuangan pada saat tanggal permohonan

RINCIAN DAFTAR MESIN (15)

I. Sebagai PKP yang menghasilkan BKP (16)

SUB ITEM	URAIAN	KODE HS	JUMLAH	SATUAN
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

II. Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC (17)

SUB ITEM	URAIAN	KODE HS	JUMLAH	SATUAN
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-



B. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

DAFTAR MESIN (18)

PKP yang menyerahkan :(19)

I. Sebagai PKP yang menghasilkan BKP (20)

No	JENIS BARANG	KODE HS	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA (Rp)	PERKIRAAN PPN TERUTANG (Rp)*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-

II. Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC (21)

No	JENIS BARANG	KODE HS	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA (Rp)	PERKIRAAN PPN TERUTANG (Rp)*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-

de

✍

RINCIAN DAFTAR MESIN (22)

I. Sebagai PKP yang menghasilkan BKP (23)

SUB ITEM	URAIAN	KODE HS	JUMLAH	SATUAN
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

II. Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC (24)

SUB ITEM	URAIAN	KODE HS	JUMLAH	SATUAN
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

de

f

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP

- (1) Diisi dengan nama PKP.
- (2) Diisi dengan NPWP PKP.
- (3) Diisi dengan alamat PKP.
- (4) Diisi dengan nomor RKIP.
- (5) Diisi dengan tanggal penerbitan RKIP (sama dengan tanggal penerbitan SKB PPN).
- (6) Diisi dengan nomor SKB PPN.
- (7) Diisi dengan periode SKB PPN.
- (8) Diisi dengan nomor kontrak, jika ada.
- (9) Diisi dengan lokasi proyek.
- (10) Daftar Mesin (Impor)
- (11) Diisi dengan nama pelabuhan tempat Mesin dan Peralatan diimpor.
- (12) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Mesin dan Peralatan diimpor.
- (13) Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yang menghasilkan BKP
 - 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan jenis barang.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan negara asal Mesin dan Peralatan.
 - 5- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan.
 - 6- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.
 - 7- Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.
 - 8- Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.
 - 9- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
 - 10- Diisi dengan jumlah Bea Masuk.
- (14) Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC
 - 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan jenis barang.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan negara asal Mesin dan Peralatan.
 - 5- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan.
 - 6- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.
 - 7- Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.
 - 8- Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.
 - 9- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
 - 10- Diisi dengan jumlah Bea Masuk .
- (15) Rincian Daftar Mesin
- (16) Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yang menghasilkan BKP
 - 1- Diisi dengan nomor urut sub item.
 - 2- Diisi dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan beserta spesifikasinya.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.



- 4- Diisi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesuai dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.
 - 5- Diisi dengan satuan komponen Mesin dan Peralatan.
- (17) Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC
- 1- Diisi dengan nomor urut sub item.
 - 2- Diisi dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan beserta spesifikasinya.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesuai dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.
 - 5- Diisi dengan satuan komponen Mesin dan Peralatan.
- (18) Daftar Mesin (Perolehan)
- (19) Diisi dengan nama dan NPWP PKP yang menyerahkan Mesin dan Peralatan Pabrik (PKP Penjual).
- (20) Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yang menghasilkan BKP
- 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan jenis barang.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan.
 - 5- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.
 - 6- Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.
 - 7- Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.
 - 8- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
- (21) Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC
- 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan jenis barang.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan.
 - 5- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.
 - 6- Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.
 - 7- Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.
 - 8- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
- (22) Rincian Daftar Mesin (Perolehan)
- (23) Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yang menghasilkan BKP
- 1- Diisi dengan nomor urut sub item.
 - 2- Diisi dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan beserta spesifikasinya.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesuai dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.
 - 5- Diisi dengan satuan komponen Mesin dan Peralatan.
- (24) Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC
- 1- Diisi dengan nomor urut sub item.
 - 2- Diisi dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan beserta spesifikasinya.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.



- 4- Diisi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesuai dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.
- 5- Diisi dengan satuan komponen Mesin dan Peralatan.

h

f

E. CONTOH FORMAT RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) PERUBAHAN

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) PERUBAHAN

NOMOR RKIP PERUBAHAN :(1)

TANGGAL :(2)

NOMOR RKIP SEMULA :(3)

NOMOR SKB PPN :(4)

PERIODE SKB PPN :(5)

NAMA :(6)

NPWP :(7)

ALAMAT :(8)

NO. KONTRAK LAMA :(9)

NO. KONTRAK BARU :(10)

A. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS PERUBAHAN (11)

[illegible]

B. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS PERUBAHAN (12)

	PKP yang menyerahkan		Jenis Mesin dan Peralatan pabrik		Utuh/terlepas	Jenis Barang Komponen	Kuantitas		Kode HS	Spesifikasi teknis	Perkiraan Nilai Impor		Perkiraan PPN Terutang	Lokasi Proyek	
	semula	menjadi	semula	menjadi			semula	menjadi			Per satuan	total		semula	menjadi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
I.	Sebagai PKP yang menghasilkan BKP														
II.	Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC														

.....(13)

Pemohon

..... (14)





PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN

- (1) Diisi dengan nomor RKIP perubahan.
- (2) Diisi dengan tanggal penerbitan RKIP perubahan.
- (3) Diisi dengan nomor RKIP semula.
- (4) Diisi dengan nomor SKB PPN.
- (5) Diisi dengan periode SKB PPN.
- (6) Diisi dengan nama PKP.
- (7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP.
- (8) Diisi dengan alamat PKP.
- (9) Diisi dengan nomor kontrak lama (dalam hal PKP adalah Pemilik Proyek dan Penyedia Pekerjaan EPC, jika yang mengalami perubahan adalah kontrak).
- (10) Diisi dengan nomor kontrak baru (dalam hal PKP adalah Pemilik Proyek dan Penyedia Pekerjaan EPC, jika yang mengalami perubahan adalah kontrak).
- (11) Tabel Rencana Kebutuhan Impor Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis Perubahan
 - 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan nama Kantor Pabean semula.
 - 3- Diisi dengan nama Kantor Pabean sekarang.
 - 4- Diisi dengan Pelabuhan kedatangan semula.
 - 5- Diisi dengan Pelabuhan kedatangan sekarang.
 - 6- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan semula.
 - 7- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan sekarang.
 - 8- Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh atau secara terlepas.
 - 9- Diisi dengan jenis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 10- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas semula.
 - 11- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas sekarang.
 - 12- Diisi dengan kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 13- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 14- Diisi dengan perkiraan nilai impor per satuan Mesin dan Peralatan.
 - 15- Diisi dengan perkiraan nilai impor total Mesin dan Peralatan.
 - 16- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
 - 17- Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan semula.



- 18- Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan sekarang.
- (12) Tabel Rencana Kebutuhan Perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis Perubahan
- 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan nama PKP yang menyerahkan/PKP penjual semula.
 - 3- Diisi dengan nama PKP yang menyerahkan/PKP penjual sekarang.
 - 4- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan semula.
 - 5- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan sekarang.
 - 6- Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh atau secara terlepas..
 - 7- Diisi dengan jenis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika diimpor/diperoleh secara terlepas
 - 8- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas semula.
 - 9- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas sekarang.
 - 10- Diisi dengan kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 11- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 12- Diisi dengan perkiraan nilai impor per satuan Mesin dan Peralatan.
 - 13- Diisi dengan perkiraan nilai impor total Mesin dan Peralatan.
 - 14- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
 - 15- Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan semula.
 - 16- Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan sekarang.
- (13) Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan perubahan RKIP.
- (14) Diisi dengan nama dan jabatan pemohon.



F. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PEROLEHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK

NAMA :(1)
NPWP :(2)
ALAMAT :(3)
LOKASI PROYEK :(4)
NO. KONTRAK*) :(5)
NO SKB PPN :(6)

1. REALISASI IMPOR MESIN DAN PERALATAN PABRIK (7)

No	Nomor PIB	Jenis Mesin dan Peralatan	Utuh/Terlepas	Jenis Barang Komponen Mesin dan Peralatan	Spesifikasi teknis	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor		PPN	Lokasi proyek
								Per satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Total											

2. REALISASI PEROLEHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK (8)

No	Nomor Faktur Pajak	Jenis Mesin dan Peralatan	Utuh/Terlepas	Jenis Barang Komponen Mesin dan Peralatan	Nama & NPWP PKP Penjual	Spesifikasi teknis	Kode HS	Kuantitas	Harga Jual		PPN	Lokasi proyek
									Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
Total												

h

h

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PEROLEHAN
MESIN DAN PERALATAN PABRIK

- (1) Diisi dengan nama PKP.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP.
- (3) Diisi dengan alamat PKP.
- (4) Diisi dengan lokasi proyek.
- (5) Diisi dengan nomor kontrak (untuk Pemilik Proyek dan Penyedia Pekerjaan EPC).
- (6) Diisi dengan nomor SKB PPN.
- (7) Tabel Realisasi Impor Mesin dan Peralatan Pabrik
 - 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
 - 3- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan.
 - 4- Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh atau secara terlepas.
 - 5- Diisi dengan jenis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 6- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 7- Diisi kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 8- Diisi jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 9- Diisi nilai impor per satuan Mesin dan Peralatan.
 - 10- Diisi nilai impor total Mesin dan Peralatan.
 - 11- Diisi nilai PPN terutang.
 - 12- Diisi lokasi proyek di mana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan.
- (8) Tabel Realisasi Perolehan Mesin dan Peralatan Pabrik
 - 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan nomor Faktur Pajak.
 - 3- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan.
 - 4- Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh atau secara terlepas.
 - 5- Diisi dengan jenis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 6- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP Penjual.
 - 7- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 8- Diisi kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.



- 9- Diisi jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
- 10- Diisi harga jual per satuan Mesin dan Peralatan.
- 11- Diisi harga jual total Mesin dan Peralatan.
- 12- Diisi PPN terutang.
- 13- Diisi lokasi proyek di mana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan.



G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK KEPADA PEMILIK PROYEK

LAPORAN REALISASI PENYERAHAN
MESIN DAN PERALATAN PABRIK KEPADA PEMILIK PROYEK

I. IDENTITAS PKP PENYEDIA PEKERJAAN EPC

NAMA :(1)
NPWP :(2)
ALAMAT :(3)
NOMOR KONTRAK :(4)
NOMOR SKB PPN :(5)

II. IDENTITAS PEMILIK PROYEK

NAMA :(6)
NPWP :(7)
ALAMAT :(8)
NOMOR SKB PPPN :(9)

REALISASI PENYERAHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK (10)

Nomor	Jenis Mesin dan Peralatan	Kuantitas	Spesifikasi teknis	Kode HS	Lokasi proyek
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
LAPORAN REALISASI PENYERAHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK
KEPADA PEMILIK PROYEK

- (1) Diisi dengan nama PKP Penyedia Pekerjaan EPC.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP Penyedia Pekerjaan EPC.
- (3) Diisi dengan alamat PKP Penyedia Pekerjaan EPC.
- (4) Diisi dengan nomor kontrak.
- (5) Diisi dengan nomor SKB PPN Penyedia Pekerjaan EPC.
- (6) Diisi dengan nama Pemilik Proyek.
- (7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemilik Proyek.
- (8) Diisi dengan alamat Pemilik Proyek.
- (9) Diisi dengan nomor SKB PPN Pemilik Proyek.
- (10) Tabel Realisasi Penyerahan Mesin dan Peralatan Pabrik
 - 1- Diisi dengan nomor urut
 - 2- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan.
 - 3- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.
 - 4- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 5- Diisi kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 6- Diisi lokasi proyek di mana Mesin dan Peralatan ditempatkan.



H. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN PENGANTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGANTI
Nomor: KET-(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor(3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

nama :(4)
NPWP :(5)
alamat :(6)
jenis usaha :(7)
lokasi proyek :(8)
no. SKB PPN lama :(9)
periode SKB PPN lama :(10)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan sebagaimana terlampir, untuk periode sejak(11)

Demikian disampaikan.

....., ...(12)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode verifikasi



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN PENGANTI

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
- (5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN.
- (6) Diisi dengan alamat PKP pemohon SKB PPN.
- (7) Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemohon SKB PPN sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (8) Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan akan ditempatkan
- (9) Diisi dengan nomor SKB PPN yang lama
- (10) Diisi dengan periode berlaku SKB PPN yang lama
- (11) Diisi dengan periode yang sama dengan periode SKB PPN yang lama
- (12) Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN



I. CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor: KET- (2)

Sehubungan dengan diperolehnya data/informasi yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak:

nama :(3)
NPWP :(4)
alamat :(5)
lokasi proyek :(6)

tidak berhak untuk mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga atas Surat Keterangan Bebas PPN nomor(7) tanggal(8), yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak dibatalkan.

.....(9)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode verifikasi



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PEMBATALAN SKB PPN

- (1) Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar.
- (2) Diisi dengan nomor pembatalan SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
- (4) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN.
- (5) Diisi dengan alamat PKP pemohon Pembatalan SKB PPN.
- (6) Diisi lokasi proyek di mana Mesin dan Peralatan ditempatkan.
- (7) Diisi nomor SKB PPN yang dibatalkan.
- (8) Diisi tanggal penerbitan SKB PPN yang dibatalkan.
- (9) Diisi tempat dan tanggal penerbitan pembatalan SKB PPN.



J. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SURAT KETETANGAN BEBAS PPN
Nomor: KET-(2)

Sehubungan dengan keputusan pencabutan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak nomor.....(3), atas Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai (SKB PPN) nomor.....(4), yang diberikan kepada:

nama :(5)
NPWP :(6)
alamat :(7)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal keputusan pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan.

Demikian disampaikan.

.....(8)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode verifikasi

Surat keterangan ini ditujukan kepada:

1. Kantor Pabean
2. Pemilik SKB PPN
3. Lainnya



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN
PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN

- (1) Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar.
- (2) Diisi dengan nomor pencabutan SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pencabutan pengukuhan PKP.
- (4) Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPN yang akan dicabut.
- (5) Diisi dengan nama PKP pemilik SKB PPN.
- (6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemilik SKB PPN.
- (7) Diisi dengan alamat PKP pemilik SKB PPN.
- (8) Diisi tempat dan tanggal surat keterangan pencabutan SKB PPN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH *AS*

NIP 19730213-199703 1 001

le

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/PMK.03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN
TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU
DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SURAT PERNYATAAN DAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN DALAM
PEMANFAATAN PEMBEBAHAN DARI PENGENAAN PPN ATAS RUMAH SUSUN
SEDERHANA MILIK

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA (PEMBELI ADALAH
KARYAWAN)

SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama :(1)
nomor induk kependudukan/NPWP :(2)
jabatan :(3)

bertindak selaku pimpinan/pemberi kerja dari
nama :(4)
nomor induk kependudukan/NPWP :(5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan yang
diterima oleh Saudara(6) adalah sebesar Rp.....(7) setiap
bulannya.

Demikian surat keterangan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan
serta dapat dipertanggungjawabkan.

(tempat), (tanggal)...(8)

Yang menyatakan,

meterai

(nama).....(9)

(jabatan)....(10)



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA

- (1) Diisi dengan nama pemberi kerja.
- (2) Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau NPWP pemberi kerja.
- (3) Diisi dengan jabatan pemberi kerja.
- (4) Diisi dengan nama Orang Pribadi.
- (5) Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau NPWP Orang Pribadi.
- (6) Diisi dengan nama Orang Pribadi penerima penghasilan.
- (7) Diisi dengan jumlah penghasilan Orang Pribadi per bulan.
- (8) Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- (9) Diisi dengan nama lengkap dan jelas pemberi kerja.
- (10) Diisi dengan jabatan pemberi kerja.



B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BESARNYA PENGHASILAN
(PEMBELI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS)

SURAT KETERANGAN BESARNYA PENGHASILAN

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama :(1)
nomor induk kependudukan/NPWP :(2)
pekerjaan :(3)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan yang saya terima dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah sebesar Rp.....(4) setiap bulannya.

Demikian surat keterangan ini Diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

(tempat), (tanggal)...(5)
Yang menyatakan,

meterai

(nama).....(6)



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BESARNYA PENGHASILAN

- (1) Diisi dengan nama Orang Pribadi/pembeli.
- (2) Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau NPWP Orang Pribadi/pembeli.
- (3) Diisi dengan pekerjaan Orang Pribadi/pembeli.
- (4) Diisi dengan jumlah penghasilan Orang Pribadi/pembeli per bulan.
- (5) Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- (6) Diisi dengan nama lengkap dan jelas Orang Pribadi/pembeli.



C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN UNIT HUNIAN PERTAMA YANG DIMILIKI, DIGUNAKAN SENDIRI SEBAGAI TEMPAT TINGGAL DAN TIDAK AKAN DIPINDAHTANGANKAN

SURAT PERNYATAAN
RENCANA KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama(1)
nomor induk kependudukan(2)
NPWP*)(3)

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. saya adalah Orang Pribadi, dengan data sebagai berikut:

nama pemberi kerja**) 4)
NPWP/nomor induk kependudukan pemberi kerja***)(5)
jumlah penghasilan per bulan(6);

b. akan melakukan perolehan Rumah Susun Sederhana Milik, dengan jumlah tidak melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

c. Rumah Susun Sederhana Milik tersebut merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun, dengan data sebagai berikut:

nama penjual(7)
NPWP(8)
alamat Rumah Susun Sederhana Milik
desa/kelurahan(9)
kecamatan(10)
kab./kota(11)
luas unit hunian (m2)(12).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....(13)

meterai

.....(14)

*) Diisi dalam hal Orang Pribadi memiliki NPWP
**) Diisi dalam hal Orang Pribadi adalah karyawan
***) dalam hal pemberi kerja tidak memiliki NPWP



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
RENCANA KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK

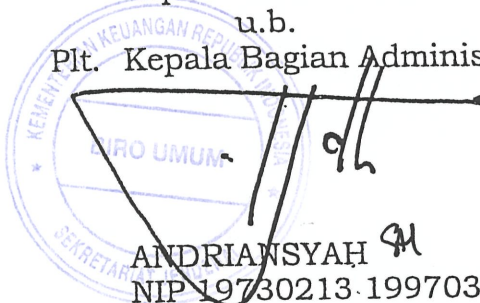
- (1) Diisi dengan nama Orang Pribadi.
- (2) Diisi dengan nomor induk kependudukan Orang Pribadi.
- (3) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi.
- (4) Diisi dengan nama pemberi kerja.
- (5) Diisi dengan NIK dan/atau NPWP pemberi kerja.
- (6) Diisi dengan jumlah penghasilan Orang Pribadi per bulan.
- (7) Diisi dengan nama PKP penjual Rumah Susun Sederhana Milik.
- (8) Diisi dengan NPWP PKP penjual Rumah Susun Sederhana Milik.
- (9) Diisi dengan nama desa/kelurahan lokasi Rumah Susun Sederhana Milik.
- (10) Diisi dengan nama kecamatan lokasi Rumah Susun Sederhana Milik.
- (11) Diisi dengan nama kabupaten/kota lokasi Rumah Susun Sederhana Milik.
- (12) Diisi dengan luas unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang akan dibeli.
- (13) Diisi tempat dan tanggal surat pernyataan.
- (14) Diisi nama lengkap dan jelas Orang Pribadi yang akan membeli unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213.199703 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/PMK.03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN
TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU
DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

CONTOH TRANSAKSI DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK BAGI PENYEDIA PEKERJAAN EPC

PT ABC Karya adalah perusahaan Penyedia Pekerjaan EPC yang memperoleh pekerjaan untuk membangun pabrik pupuk di Aceh. Pemilik Proyek pabrik pupuk tersebut adalah PT Pupuk DEF. Dalam proyek tersebut PT ABC Karya akan melakukan pekerjaan *engineering, procurement and construction*. Adapun atas proyek pembangunan pabrik pupuk tersebut, PT ABC Karya sebagian mengimpor barang dari *supplier* luar negeri dan sebagian lagi dibeli dari produsen lokal, PT GHI Teknik. Pada PT GHI Teknik, PT ABC Karya membeli 2 (dua) set Mesin dan Peralatan pabrik penghasil pupuk. Selain itu, PT ABC Karya juga membeli 3 (tiga) buah *forklift* dan 1 (satu) set *conveyor belt* yang akan diletakkan di bagian *packaging*. Atas pembelian tersebut, PT ABC Karya menunjukkan bahwa ia memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN BKP tertentu yang bersifat strategis atas transaksi Mesin dan Peralatan pabrik. Sehingga atas transaksi dengan PT ABC Karya tersebut, PT GHI Teknik membuat 2 (dua) faktur pajak atas nama PT ABC Karya:

- 1 (satu) faktur pajak 01 untuk pembelian 3 (tiga) buah *forklift* dan 1 (satu) *conveyor belt*; dan
- 1 (satu) faktur pajak 08 untuk pembelian 2 (dua) set Mesin dan Peralatan pabrik penghasil pupuk, dengan keterangan “PPN DIBEBAHKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 48 TAHUN 2020”.

Sesuai dengan kontrak pekerjaan EPC, setelah pabrik pupuk selesai dibangun maka PT ABC Karya harus menyerahkannya kepada PT Pupuk DEF. Atas penyerahan tersebut PT ABC Karya membuat faktur pajak atas nama PT Pupuk DEF sebagai berikut:

- faktur pajak 01 untuk penyerahan **selain** Mesin dan Peralatan pabrik (termasuk jika terdapat margin dan nilai tambah lain); dan



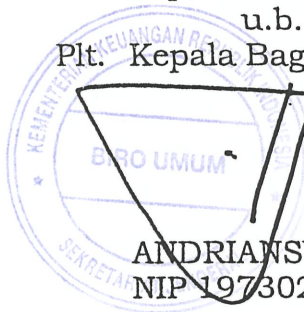
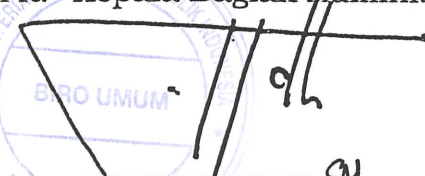
- faktur pajak 08 untuk penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik yang digunakan untuk menghasilkan pupuk, dengan keterangan “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 48 TAHUN 2020”.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH 
NIP 19730213-199703 1 001

